



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,  
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, DAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (BINAPENTA NAKER) Kementerian Ketenagakerjaan RI 2. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (BINALATTAS) Kementerian Ketenagakerjaan RI
Acara	: Pendalaman Rincian Program dan Kegiatan RAPBN-P Tahun 2015 para Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 9 Februari 2015
Pukul	: 09.00 WIB – selesai
Ketua Rapat	: H. Syamsul Bachri S., M.Sc/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Muhammad Yus Iqbal, SE/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. Anggota Komisi IX DPR RI orang dari 48 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Dirjen Binapenta Naker Kementerian Ketenagakerjaan RI beserta jajaran; C. Dirjen Binalattas Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Binapenta Naker dan Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan RI dibuka pukul 09.45

WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI dapat memahami:
  - a. APBN Ditjen Bina Pentanaker Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2015 sebesar **Rp.853.208.025.000,- (delapan ratus lima puluh tiga milyar dua ratus delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)**. Ditjen Bina Pentanaker mendapatkan alokasi anggaran tambahan 2015 sebesar **Rp.220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh milyar rupiah)** sehingga total anggaran tahun 2015 menjadi **Rp.1.073.208.025.000,- (satu trilyun tujuh puluh tiga milyar dua ratus delapan juta dua puluh lima ribu rupiah)**.
  - b. APBN Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2015 sebesar **Rp.1.347.812.823.000,- (satu trilyun tiga ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus duabelas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)**. Ditjen Binalattas mendapatkan alokasi anggaran tambahan 2015 sebesar **Rp.285.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima milyar rupiah)** sehingga total anggaran tahun 2015 menjadi **Rp.1.632.812.823.000,- (satu trilyun enam ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus duabelas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)**.
2. Komisi IX DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menyampaikan rincian dan *realokasi* usulan program dan kegiatan dalam RAPBN-P tahun 2015 kepada Komisi IX DPR RI dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh masukan dan saran anggota Komisi IX DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini. Rincian dan realokasi usulan program/kegiatan agar diserahkan ke Komisi IX DPR RI pada tanggal 10 Februari 2015.
3. Komisi IX DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk :
  - a. mengoptimalkan penggunaan anggaran terutama untuk program/kegiatan perluasan dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan revitalisasi BLK/ BLKLN.

- b. lebih fokus pada program pemberdayaan masyarakat dengan indikator yang jelas dan terukur sehingga tepat sasaran.

untuk kedua hal tersebut dilakukan dengan melibatkan representasi Anggota Komisi IX DPR RI berdasarkan aspirasi daerah.

4. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan RI untuk mengambil keputusan terkait pembahasan RAPBN-P Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI

Catatan:

Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan RI diminta untuk menyerahkan daftar seluruh BLK, (milik pemerintah dan swasta) dengan keterangan wilayah dan prioritas pengelolaan kepada Komisi IX DPR RI.

**Rapat akhiri pukul 12.55 WIB**

**KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,**



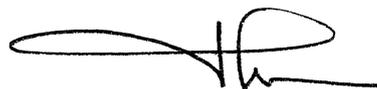
**H. SYAMSUL BACHRI S.,M.Sc**

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN  
TENAGA KERJA KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN RI,**



**DR. Dra. REYNA USMAN, MM**

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN DAN  
PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN RI,**



**Ir. KHAIRUL ANWAR, MM**